

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan No. :112/Pid.B/2013/PN.MKS)

OLEH

ANDI TENRI WALINONONG

B 111 11 263

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan No. :112/Pid.B/2013/PN.MKS)

OLEH:

ANDI TENRI WALINONONG

B 111 11 263

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Usulan Penelitian Dalam Seminar Usulan Penelitian
untuk Penyusunan Skripsi pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 112/PID.B/2013/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:


ANDI TENRI WALINONONG

B111 11 263

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 6 Maret 2015 dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris,



Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

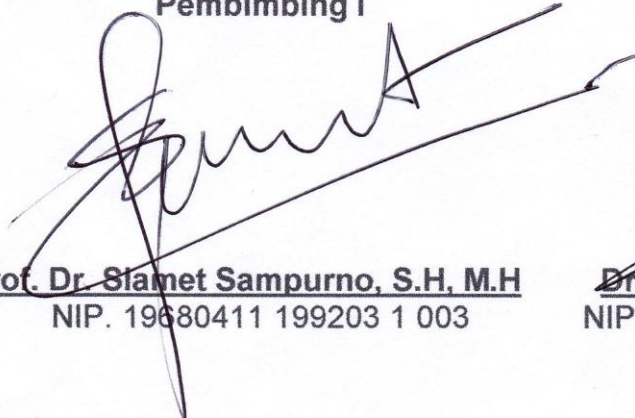
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI TENRI WALINONONG
Nomor Induk : B 111 11 263
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No. :112/Pid.B/2013/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

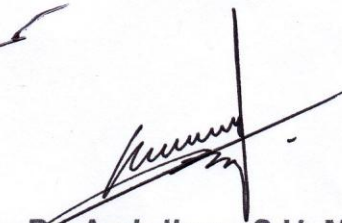
Makassar, Januari 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H
NIP.19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI TENRI WALINONONG**
No. Pokok : B111 11 263
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual (Persetubuhan)
terhadap Anak (Studi Kasus Putusan
No.112/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

ANDI TENRI WALINONONG (B111 11 263), TINJAUAN YURIDIS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 112/pid.B/2013/Pn.Mks). Dibawah Bimbingan Bapak Slamet Sampurno Selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur delik dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak apakah telah memenuhi syarat pemidanaan menurut hukum pidana dalam perkara putusan Nomor: 112/Pid.B/Pn.Mks?

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara langsung dengan Narasumber dari Instansi terkait. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara Yuridis deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertimbangan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur delik dalam perkara putusan Nomor: 112/Pid.B/2013/P.N.Mks telah memenuhi unsur dengan melihat pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2). Penjatuhan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur delik dalam perkara putusan Nomor: 112/Pid.B/2013/P.N.Mks telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan menurut hukum pidana. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan di persidangan karena alat Bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi dan korban yang saling berkesesuaian, ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah segala puji dan Syukur atas nikmat kesehatan serta kesabaran dan keikhlasan yang Allah Berikan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL (PERSETUBUHAN) TERHADAP ANAK (Studi kasus putusan Nomor 112/Pid,B/2013/P.N.MKS)”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah merupakan hasil penelitian dari Studi kasus putusan Nomor 112/Pid.B/2013/P.N.Mks. Skripsi ini merupakan persyaratan menempuh ujian akhir strata satu (S1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASA HASANUDDIN. Namun sebelum penulis melangkah lebih jauh tentunya penulis menyadari bahwa penulis akan mengalami kesulitan tanpa adanya Bantuan, dorongan dan motifasi oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimah kasih kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda **H. ANDI MADDUSSILA TAKKA** dan IBUNDA TERCINTA **Hj. ANDI HERMI SANAWAWI** yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta Membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan masukan-masukan yang bernilai positif... menyayangi sepenuh hati dengan segala kecintaan yang beliau miliki. Terimah kasih atas segala dedikasi yang kalian berikan kepada penulis. Andai kalian tahu mimpi ini sangat sulit tuk aku raih namun semua atas doa dan kekuatan cinta yang kalin berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas Akhir untuk meraih Gelar SARJANA HUKUM...

Terimah kasih kepada Kakak ku Tercinta **ANDI BENRI GAU** Serta Adik-adikku **A.PALEWAI, A.FALANTIKA, A.PUTRA BATARA,** dan **A.HABIB TAHTA** I Love You all.

Terimah kasih buat Kakek dan Nenek **H. A.SANAWAWI** dan **Hj. A. SRI NASTUTY** dan **Hj.SITTI** Juga Buat Om ku, **A. Heryuyu, Muh. Fadil.M** serta Sepupuku yang tidak bisa penulis sebut satu persatu dan juga Terimah kasih buat kak **Tasma** yang mulai dari bayi merawat penulis hingga dewasa seperti ini yang slalu ada saat penulis butuh dan tempat mencurahkan segala isi hati serta tempat mengadu saat di setiap suka dan duka. TERIMAH KASIH buat KELUARGA KECILKU...Tanpa kalian penulis bukan siapa-siapa, Segala usaha dan pencapaian yang penulis raih, segalanya untuk kalian. Kupersembhkan kebahagiaan ini untukmu orang-orang terkasih.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan Ucapan terimah Kasih Kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum**
3. Pembantu Dekan I, **Prof.Dr. Ahmadi Miru,S.H.,M.H**
4. **Prof.Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. **Prof.Dr. Said Karim,S.H.,M.si, Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H, Hj. Haerana, S.H.,M.H, Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H, dan Dr. Wiwie Heryani,S.H.,M.H** selaku Penguji yang Banyak Memberikan Masukan.
6. **Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H** yang banyak mensupport penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Terkhusus kepada Dosen Bagian Pidana, Terimah kasih atas ilmu yang terus mengalir yang di ajarkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan SKRIPSI ini. Terimah Kasih kepada seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam pengurusan tugas Akhir mulai dari awal sampai Saat ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan Penelitian.
9. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar **Ramli Djalil,S.H.,M.H,** Terimah kasih Atas Bimbingannya,dan
- 10.Staf pengadilan Negeri Makassar **Mustari Muis,S.H** dan **Wilson,S.H** yang telah membantu penulis dalam penelitian, mengarahkan dan memberikan data dan informasi seputar kasus yang penulis butuhkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
11. Terimah kasih kepada Ibunda **Hj. Rusni Kasman,S.H.,M.kn** yang slalu mensupport penulis

12. Terimah Kasih Kepada **Hj A.Rulis Alimudin Takka** yang banyak membantu penulis

13. **Askariato S.H** Yang banyak membantu, mensupport dan membimbing penulis dan

Terimah kasih kepada seluruh teman-teman Angkatan **MEDIASI 2011** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu...yang senantiasa mensupport dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terkhusus kepada sahabat sekaligus saudara penulis **Akbar Ade Putra, Bardan Semme, Andi Ishaq Aqso, A. Izman Maulana Padjalangi, WR. Seger Warsito, Agam Abdul Haq, Harfandi Sanubari, Januar Suranda, Ismail Salam Basir, Ikhsan Wahidin, Fajar, Arman, A. Batari Toja, Asma Jafar, Sarpati Saputri, Ari Mentari dan Irma Febrianti** “ *YOU ARE MY BEST FRIEND’S FOREVER* ” Trimah kasih buat kalian semua yang selalu memberikan kebahagiaan serta menjadi teman baik dalam hari-hari penulis, semoga kita senantiasa berjalan di koridor cinta sebagaimana kita adalah manifestasi dari cinta.

Kepada seluruh keluarga Besar **IKATAN MAHASISWA HUKUM BONE**, penulis juga ingin mengucapkan terimah Kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian Tanamkan Kepada Penulis. Terkhusus Kepada Kanda **ASHO’** Terimah kasih Atas bimbingan yang tiada hentinya serta senantiasa memberikan masukan dan kritikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan Buat **SENIOR 2010, A.Fahrul, Rangga, A.Ichsan, Fahril, Adhy, Angga, Sahrul, A. Arkham dan Tri alvian**. Terimah Kasih untuk kebaikan kakak, TERIMAH

KASIH Juga kepada senior angkatan Tua , **Kak Rudy, Kak Koko, Kak Kak Itul** dan **Kak Eris** yang slalu ada untuk penulis yang selalu membua Penulis tertawa dan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya meski kadang-kadang Menyebalkan *YOU'RE MY EVERYTING BROTHER...*Takkan terlupakan Kegilaanmuuu...

Trimah kasih juga Buat juniorKU... **Anhy, Mitha,Dian, Nurul, Vita, Selly, Feby, Iutfy, Ifhul, Ardy sauchi, Akbaryadi, hery, kahar** dan smuanya yang tidak bisa penulis sebut satu/satu ...

Terimah Kasih kepada Keluarga Besar **PMB UH LATENRITATTA** Jaya dan kompak Slalu...

Terimah kasih Kepada Keluarga Besar **PSM UNHAS (PADUAN SUARA MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN)** Kalian Luar Biasaaa.

Terimah kasih Buat Teman-teman SD,SMP, dan SMA yang tidak bisa penulis sebut satu/satu. Kepada keluarga besar Gerghet Chubidhaby...**Momen, Purna, Lisha, Shalma, Anhy, Ifho...**trimah kasih atas supportnya Penulis sayang kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan.

Wassalam...

Makassar, januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Dasar	18
1. Tindak Pidana	18
2. Pengertian Anak	22
B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	28
C. Hak Asasi Anak	34
D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak	38
E. Kekerasan Terhadap Anak	46
F. Kekerasan Seksual	51
G. Pasal-pasal Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak...	53
H. Perlindungan Saksi dan korban	56
I. Hal-hal Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	59

BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Lokasi Penelitian	62
B. Tipe Penelitian	62
C. Jenis dan Sumber data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	63
 BAB IV HASIL PENELIATIAN	
A. Pertimbangan Hukum tentang Terpenuhinya Unsur delik...	64
1. Posisi Kasus	64
2. Dakwaan Penuntut Umum	65
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	68
4. Pertimbangan Hukum Hakim	68
5. Amar Putusan	69
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.....	71
 BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	79
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah anak perlu mendapat perhatian serius baik dalam lingkungan keluarga maupun dari masyarakat ilmiah agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Perlindungan hukum terhadap anak masih kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa, dari hasil Pemetaan Sosial Program Bantuan Sosial Tahun 2003 yang dilakukan Departemen Sosial terlihat bahwa korban paling banyak yang mengalami kekerasan adalah anak-anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap hak-hak anak. Terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak dan ditandatanganinya Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan telah disahkan dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa“ Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam Deklarasi, tanpa perbedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau paham lainnya dan dirinya atau dari keluarganya”. Disamping itu semua anak berhak dalam perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas dan terhormat.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002 yang merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian di Indonesia adalah relatif baru, sekalipun kelahiran perlindungan anak itu sendiri telah lahir bersama lahirnya hak-hak anak secara universal yang diakui dalam sidang umum PBB tanggal 20 November 1959 (Declaration of the Right of the Child), yang dalam mukadimahny tersirat kewajiban memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan di dalam Era pembangunan hukum yang mempunyai kaitan dengan kehidupan anak/remaja, demi mencapai kesejahteraan bagi Anak.

Penegakan hukum tentang perlindungan anak pada khususnya, terkait didalamnya masalah sosial politik dan politik kesejahteraan anak yang berlaku atau yang diberlakukan pada suatu masyarakat atau negara tertentu dan kondisi kultural masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu berlaku.

Kekerasan yang menimpa anak terutama yang terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan.

Tindak kejahatan ini terselubung, kebanyakan kasus sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan. Kasus ini terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlukaan yang parah atau bahkan meninggal. Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang dekat dengan anak, sehingga sulit untuk memantau apa yang terjadi di rumah, di lembaga-lembaga dan di sekolah. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual dan emosi serta penelantaran. Semua ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pasal 19 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus mengambil tindakan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk maupun eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang mengasuh anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) melalui Pasal 13 mendukung hal ini dengan menyatakan secara jelas bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang bisa dikenakan hukuman kurungan maupun denda.

Menurut Lindawati Ginting (2000:165) perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam lingkup keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat dan Negara. Kekerasan terjadi karena adanya paradigma yang keliru mengenai anak, baik di kalangan orang tua, pendidik, media elektronik, tokoh Panutan maupun pejabat atau pemimpin bangsa. Mereka beranggapan seolah anak boleh diperlakukan apa saja, anak tidak boleh bersuara, anak tidak perlu didengar pendapatnya, anak boleh dilupakan dan akhirnya anak bisa diletakkan pada prioritas paling akhir. Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, biasanya disebabkan karena kebanyakan anggota masyarakat mempunyai persepsi bahwa anak merupakan milik orang tua, sehingga mereka harus menerima perlakuan apa saja yang dianggap wajar oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, termasuk pandangan bahwa kekerasan merupakan bagian dari cara mendidik dan untuk menanamkan rasa patuh anak kepada orang tua. Keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Jadi, akar dari permasalahan kekerasan terhadap anak adalah

adanya interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama dan faktor budaya setempat.

Purnianti dan Rita Serena Kolibonso (2003:51) seorang anak secara hukum sepenuhnya dapat menjadi subyek sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan mengatas-namakan “disiplin rumah tangga”. Orang tua berhak untuk menjatuhkan hukuman fisik “seperlunya dan layak” untuk kebaikan anak-anak mereka. Dan sah menurut hukum bagi orang tua atau seseorang sebagai pengganti orang tua untuk melakukan tindakan koreksi kepada anaknya. Dengan kasih sayangnya beberapa tindakan dianggap layak dilakukan dalam suatu situasi. Disiplin harus layak, moderat, diatur dengan instrumen yang tepat. Orang tua bisa dituntut jika hukuman untuk kebaikan anak melebihi standar “yang masuk akal” sebagaimana yang dibenarkan oleh pengadilan. Hukuman atau pendisiplinan bagi seorang anak menjadi suatu pelanggaran hukum jika hukuman yang diberikan untuk kepuasan atas penderitaan anak atau perwujudan kemarahan atau jika hukuman yang diberikan tidak layak dan berlebihan, atau jika hukuman yang diperpanjang diluar kemampuan daya tahan anak atau dengan suatu alat yang tidak cocok untuk tujuan penghukuman dan diperkirakan dapat membahayakan nyawa dan mencederai tubuh. Hal ini terjadi karena banyak pihak pada saat ini yang lebih mementingkan unsur materi dan harta benda, bukan pada proses kehidupan itu sendiri, bahkan kesuksesan dalam hidup kemudian lebih diukur dari segi materi dari pada keberhasilan menjalani proses dan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Banyak orang yang tidak lagi memegang teguh nilai-nilai dalam dalam satu keluarga, orang tidak lagi menganggap fungsi dan posisi orang tua sebagai sebuah panggilan hidup, karena itu banyak orang tua yang tidak mampu

menjadikan keluarga sebagai tempat perlindungan yang aman dan tenteram bagi anak.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, biasanya terancam secara fisik dan nonfisik dan ini biasanya terjadi dilingkungan terdekatnya, sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kondisi demikian korban akan mengalami stress dan trauma dan apabila tidak cepat ditangani akan mengganggu kehidupannya sehari-hari.

Dari data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Potret kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2013 adalah identifikasi dan kompilasi data serta laporan kasus yang terdokumentasi di Komnas Perlindungan Anak dari hasil laporan yang masuk dan kasus yang terpantau oleh Hotline Service Komisi Nasional Perlindungan Anak yang tercatat sejak periode Januari - November 2013 paling tinggi kuantitas bentuk kekerasan terhadap anak adalah 1.620 kasus atau 30 % dari total jumlah 490 kasus kekerasan terhadap anak, peringkat kedua kekerasan fisik dengan jumlah kasus 313 atau 19 %, sedangkan 51 % atau 817 kasus adalah kasus kekerasan psikis. Sederet kasus kekerasan terhadap anak terus mencuat belakangan ini di berbagai tempat diwilayah Indonesia, sebagai fenomena gunung es, diperkirakan jumlah anak korban kekerasan jauh lebih banyak dibandingkan data resmi yang dihimpun sejumlah lembaga resmi. Berdasarkan data Plan Indonesia yang dikutip oleh sebuah media cetak nasional, saat ini diperkirakan ada 3.023 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang memiliki porsi terbesar adalah orang yang dikenal atau komunitas yang lebih dikenal oleh anak. Dari 3.023 pelaku

kekerasan terhadap anak yang terpantau oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak sebesar 1.245 pelaku atau 68,28 % pelaku tindak kekerasan adalah keluarga inti, kerabat, tetangga atau orang lain yang sudah dikenal korban. Hal ini membuktikan bahwa tidak selamanya orang atau komunitas yang terdekat dan dikenal oleh anak menjadi pelindung bagi anak-anak.(harian Kompas “KPAI:Tindak kekerasan pada anak” dikutip dari <http://www.kompas.com/read/xml/2009/kpai.tindak.kekerasan.pada.anak>.

Selain itu, pada **putusan pengadilan Nomor 112/Pid.B/2013 /PN.MKS** penulis menemukan sebuah kasus Persetubuhan terhadap anak yang sangat mencoreng penegakan HAM terhadap anak. Dalam perkara tersebut yang menjadi korban adalah seorang anak yang menderita cacat. Tentunya hal ini harus mendapat perhatian khusus bagi para aparat penegak hukum agar perlindungan hukum terhadap anak dapat menjadi salah satu prioritas dalam hal penegakan hukum di Negara ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat Judul Skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada putusan Pengadilan nomor:112/Pid.B/2013/PN.MKS?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukuman kepada terdakwa dalam putusan pengadilan Nomor: 112/Pid.B/2013/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam perkara Nomor:112/Pid.B/2013/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum secara khusus dalam memperberat pidana kepada terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak perkara Nomor:112/Pid.B/2013/PN.MKS.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk para aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar

1. Tindak Pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang- undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Rusli Efendy (1983:1) mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan:

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yang lain umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana (Sudarto 1975:31-32), yaitu:

1) Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di

dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D.Simons (Lamintang1997:185) tindak pidana adalah:

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Simons (Tongat 2008 : 105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif(berbuat)maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin (1987: 250) menyatakan bahwa:

“Kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut: Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab”.

Menurut J. Bauman (Sudarto 1975:31-32), “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008:106), “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.

Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.

Vanhammel (Andi Zainal Abidin 1987: 250) yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*endan schouldtowitzen*)”

2) Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan

dualistis (Tongat 2008:106) yaitu: Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggung jawaban pidana.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut: Menurut Pompe (Sudarto1975:31-32), dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Selanjutnya, terjadinya perbuatan/tindak pidana harus memenuhi unsur (Tongat2008:107)sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan(manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal1(1) KUHPidana)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno (1983:54) yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responbility*).

Moeljatno (Soedarto1975: 31-32) juga menegaskan, bahwa“ untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana,

tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak”.

2. Pengertian Anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Perumusan dengan pendekatan usia di beberapa Negara antara lain di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun, di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Sri Lanka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang Standar Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun. Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi dari umur 7–15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut: Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan Social Commision dari Economic and Social Council menyatakan, bahwa:

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muang Thai anak-anak dibawah 7 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan secara kriminal;
- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak diantara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia seperti:
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1)
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1) dan (2)
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak (pasal 1 butir 2) juga identik pada ketentuan umur di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di

Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990. (LNRI Tahun1990Nomor 57) tanggal 25 Agustus1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak adalah sebagai berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah:a.Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak (pasal 1 butir 2) adalah:

“ yang di sebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 294 dan 295 anak adalah :

ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 perkawinannya di putus, ia tidak kembali menjadi “belum cukup umur”. Hukum pidana juga mengenal belum dewasa dan dewasa.

Menurut Undang-undang Hukum perdata pasal 370 bab kelima belas bagian kesatu tentang kebelumdewasaan adalah sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Menurut Undang-undang Peradilan Anak pasal 1 ayat (1) batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 18 tahun dan maksimal 21 tahun serta belum pernah kawin .

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalil-dalil bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa "sekurang-kurang 8 (delapan) tahun", bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya berlaku secara inkonstitusional bersyarat. Dan berlaku secara konstitusional bersyarat jika proses penyidikan, penuntutan dan sidang anak, serta penahanan, pemenjaraan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak;

6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurang 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin";
7. Bahwa ketentuan dimaksud mengandung norma bahwa hanya anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak;
8. Bahwa ketentuan dimaksud mengandung norma hanya anak usia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke Sidang Anak;
9. Bahwa batas umur anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak tersebut terlalu rendah, bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi melanggar hak konstitusional anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Umur Anak Bahwa: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";
- Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang 40
- Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada pertumbuhan dan perkembangan mental anak, oleh karena itu perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak

tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005 : 4) menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan(oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto(1997:36): Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja,akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana,maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin (2004 : 59) mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut,yaitu:

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana (Andi Abu Ayyub Saleh, tanpa tahun(10):18).

Sementara itu menurut Muladi (2004:11) tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht (W.v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Bahwa orang dipenjarakan harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas.

Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok penjara.

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pembedaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karenanya maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005:31).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini

pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi(prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (Wirjono Projdodikoro, 2003: 26) "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral".

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan (verenigings theorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hermien Hadiati Koeswadji, 1995:11- 12):

Kelemahan teori absolut:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan:

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe (AndiHamzah, 2005:36). Pompe menyatakan:

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan (AndiHamzah, 2005:36), ia menyatakan:

Pidana bertujuan membalas kesalahandan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat

diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossidan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan (Andi Hamzah, 2005:37).

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005 : 37) "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana (Andi Hamzah, 2005:37).

C. Hak Asasi Anak

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktifis perempuan dalam

pawai protes mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang (Unicef,2003:12). Pada tahun 1942 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai “Deklarasi Jenewa”. Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak dan pada tanggal 2 September 1990 mulai diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1. “Konvensi hak anak ini akan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa instrumen ratifikasi atau keikutsertaan yang kedua puluh.”

Gagasan mengenai hak anak ini juga tercantum dalam Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) yang bersifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali serta pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. DUHAM merupakan suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat deklarasi ini akan berusaha dengan cara mengajarkan dan mendidik untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang progresif baik secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pemuatannya secara universal dan efektif, baik diantara bangsa- bangsa negara anggota maupun bangsa-bangsa dari wilayah-wilayahnya yang berada dibawah kekuasaan hukum mereka.

DUHAM merumuskan pengakuan atas martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tercantum dalam konvensi tersebut.

Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak sebagai: "...setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa pemberlakuan definisi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam mukadimah konvensi tersebut dijelaskan bahwa "Anak karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran". Definisi tersebut berlaku semenjak anak masih dalam kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, dan fisiknya. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1 dan 2 : "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan."

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut antara lain adalah:

Pasal 4 :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10 :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur

dalam pasal 64 ayat (3):

- a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik,mental maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembanganperkara.

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah Dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga social/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup,dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara cultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak

mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, system pendidikan yang menekankan pada hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan. Komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga dan anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam pasal 37 dan pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of the Child) yang disahkan dengan keputusan presiden No. 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; (b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (without possibility of release) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun; (c) Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek; (e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai

manusia; (f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; (g) Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat putusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut: (a) tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara; 1) yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; 2) yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak padahak-hakasi dan kebebasan orang lain; 3) mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk

memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat. (b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu”) yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan; (c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak); 1) untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum; 2) untuk diberitahu tuduhan-tuduhan Atas dirinya secara cepat dan langsung (*“promptly and directly”*) atau melalui orangtua, wali atau kuasa hukumnya, 3) untuk perkaranya yang diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan

yang berwenang, mandiri dan tidak memihak; 4) untuk tidak dipaksa memberikan

kesaksian atau pengakuan bersalah; 5) apa bila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku; 6) apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara Cuma-cuma(gratis); 7) Kerahasiaan pribadi (privacy-nya) dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan. (d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga- lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya; 1) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; 2) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati, (f) Berbagai macam putusan terhadap anak (antar alain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan, latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin anak perlakuan dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui: perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemanataan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Pasal 64 ayat [2] UU No.23 tahun 2002).

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social; pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 Ayat [3] UU No. 23 Tahun 2002).

Empat prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu mengatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan, kesehatan, hiburan dan perlindungan:

1. Non Diskriminasi

Setiap manusia tanpa kecuali anak, mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti diperbolehkan melakukan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang kepentingan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.

4. Menghargai pandangan anak

Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi serta pelaksanaan keseluruhan isi konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Terhadap prinsip ini Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan kampanye nasional untuk meningkatkan

kesadaran publik atas hak partisipatif anak, khususnya ditingkat lokal dan dimasyarakat tradisional serta mendorong penghormatan atas pandangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam sistem perawatan, administratif dan peradilan.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, tentu saja termasuk keluarga dan masyarakat luas. Secara garis besar, hak-hak anak menurut Harkristuti Harkriswono(1999) dapat digolongkan:

1. Hak atas kelangsungan hidup (rights to survival)
2. Hak untuk berkembang (rights to development)
3. Hak atas perlindungan (rights to protection)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (rights to participation).

Hak atas kelangsungan hidup termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak,dan pelayanan kesehatan.Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik,tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi senidanbudaya juga hakasasi untuk anak-anak dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

Hak perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpuldan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya,

orang dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga memberikan perlindungan terhadap seseorang termasuk anak ketika menjadi saksi atau pun korban tindak pidana, adapun perlindungan tersebut adalah

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

E. Kekerasan Terhadap Anak

The Social Work Dictionary, Barker dalam Abu Huraerah (2006:36) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok. Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2006:36) kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Sebagai sebuah masalah sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya.

Bagong Suyanto (2003:15) menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual

yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (1999) tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis:

1. Tindak kekerasan fisik.

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

2. Tindak kekerasan seksual.

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

3. Tindak kekerasan psikologis.

Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikolog anak.

4. Tindak kekerasan ekonomi.

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadang kala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan tindak kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi

perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Sementara itu dari hasil field review diseluruh Indonesia yang dilakukan Departemen Sosial RI, diperoleh indikasi bahwa ciri-ciri tindak kekerasan pada anak yang dipahami oleh semua unsur terkait tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, meskipun dari beberapa Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah cenderung menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja bukanlah sebagai perilaku tindak kekerasan. Pada umumnya berpendapat bahwa cedera fisik, mental dan sosial yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya termasuk dalam kategori tindak kekerasan.

Ciri-ciri yang teridentifikasi menggambarkan bahwa tindak kekerasan memiliki karakteristik (Anonim,2002) sebagai berikut:

1. Perilaku kekerasan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan salah (abuse), pemerasan (exploitation), penelantaran (neglection), pembedaan (discrimination), dan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya (emergency situation);
2. Bersifat verbal dan nonverbal dalam bentuk perbuatan merusak atau mencederai pihak lain;

3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun seksual atau kombinasi diantara varian tersebut;
4. Bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dan/atau yang melanggar hak asasi manusia;
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi sosialnya mengalami gangguan atau mengalami hambatan untuk mengaktualisasi dirinya secara layak bagi kemanusiaan karena dampak trauma psikososial yang dialaminya.

Pengamat dan pemerhati anak menduga banyak anak-anak yang tidak dapat mendapatkan haknya seperti hak sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta belum mendapatkan perlindungan dalam hukum sebagaimana mestinya. Sejumlah faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab kondisi demikian antara lain:

1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan sebagian orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Perubahan persepsi masyarakat terhadap anak; adanya pergeseran nilai yang berkenaan dengan intimitas dalam komunitas, menyebabkan meningkatnya kehidupan yang individualistik. Hal ini ditandai dengan berkembangnya urban kultur yang tampak lebih dominan dari pada rural kultur yang lebih bersifat komunal. Kondisi yang demikian sering menyebabkan anak kehilangan pegangan hidup dan terpaksa harus mengatasi dirinya sendiri.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Irma Setyowati(1990:23)menyatakan bahwa lingkungan terdekat anak adalah keluarga. Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga dalam keseluruhannya. Oleh sebab itu usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan anak tidaklah dapat dipisahkan dari usaha mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam arti keseluruhan.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran atas perbuatan penyalahgunaan anak oleh orang tua. Salah satunya adalah alasan klasik dan masih tetap aktual sampai sekarang yaitu masalah ekonomi atau lebih spesifik lagi kemiskinan. Para orang tua hanya berpikir bahwa hari ini mereka harus makan. Masalah kesejahteraan dan perlindungan serta hak-hak anak mereka untuk memperoleh pendidikan yang tepat tidak pernah terpikirkan oleh mereka.

Parsudi Suparlan (1989;12) menyatakan kemiskinan sering diidentikkan dengan kesulitan serta ketidakmampuan dibidang ekonomi dan sumber daya. Secara definitif, kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.

Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan (1989:16) menyatakan tentang kemiskinan, sebagai berikut:

Kekurangan menurut ekonomi sebagian terbesar bersumber kepada sistem ekonomi yang berlaku dimasyarakat yang lebih luas di mana masyarakat yang miskin hidup. Kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas tersebut terhadap kehidupan orang miskin dan adaptasinya terhadap kondisi kemiskinan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang nyata,dan bagaimana kebudayaan kemiskinan yang merekamiliki tersebut mempengaruhi sikap-sikapmereka dalam menghadapi kesempatan yang terbuka untuk memperbaiki taraf

hidup dan mengubah cara hidup yang berdasarkan pada kebudayaan kemiskinan.

Berkaitan dengan fungsi keluarga ini, negara menghormati tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua atau para anggota keluarga besar (bila dapat diterapkan) atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui oleh Konvensi Hak Anak dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan(1989:20) menyatakan negara juga akan berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Orang tua atau walinya yang sah memikul tanggung jawab utama untuk membesarkan dan membina anak yang bersangkutan, kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak anak yang dinyatakan dalam konvensi ini, negara akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua atau wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka mengasuh anak dan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk perawatan anak.

F. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya secara fisik maupun emosional yang dilakukan pelaku kepada korban semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan melanggar norma kesusilaan.

Jenis Kekerasan seksual

1. Pencabulan

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”.

2. Persetubuhan

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah suatu tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi dalam arti luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau

mengantikan tindakan senggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi Vagina atau Anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa, baik dengan kekerasan, ataupun ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda, bahkan jika dilakukan dengan cara pemaksaan baik fisik maupun nonfisik”. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai “Invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif”.

G. Pasal-pasal Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pencabulan baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, KUHP dijelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 82.

Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP (R. Soesilo 1993:212):

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP(R. Soesilo 1993:212):

- 1e.“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.
- 2e.“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belumlah masanya buat dikawin”.
- 3e. “Barang siapa membujuk (menggodanya) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Pasal 292 KUHP (R. Soesilo 1993:213):

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya halbelum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP (R. Soesilo 1993:214):

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP (R. Soesilo 1993:215):

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk

ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP (R. Soesilo 1993:216):

- 1e.“Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain”.
- 2e.“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP (R. Soesilo 1993:217):

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000(lima belas ribu rupiah).

Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan menegaskan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

H. Perlindungan Saksi Dan Korban

Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu pemerintah telah mengesahkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Dalam Pasal 1 undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, ditentukan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Hak saksi dan korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana di atur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban memuat:

- a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK; dan

e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

I. Hal yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan- pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrina yurisprudensi, dan kasus poisisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”.

Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil,terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik,dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.” Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*)

dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat kita ambil contoh dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut,yaitu: “Menimbang,bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan angka... sampai dengan... di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsure a d.b ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur

berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut diatas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau di mencermati KUHP, maka alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, recidive dan samenloop (www.legalitas.org). Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. (www.legalitas.org).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar karena institusi ini punya peranan sebagai akhir dari sebuah proses hukum yang tentunya menentukan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yang sosiologis dalam perspektif tujuan berlakunya hukum dengan menggunakan pendekatan efektifitas hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu perundang-undangan dengan perbandingan realitas hukum dan ideal hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari nara sumber berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, internet, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dari instansi terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu dilakukan terhadap informan secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita responden yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

E. Analisis Data

Data primer dan sekunder dalam bentuk data kualitatif yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Tentang Terenuhinya Unsur-Unsur Delik Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 112/Pid.B/2013/P.N.MKS.

Deskripsi Kasus

Paparan Perkara Kekerasan Seksual (perseubuhan) di Pengadilan Negeri

Makassar Putusan Nomor 112/Pid.B/2013/P.N.Mks:

Nama Lengkap	: SATRIA GUNALDHI,SE
Tempat Lahir	: Soppeng
Umur/ Tanggal Lahir	: 26 tahun /18 agustus 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. Ampana, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng
Agama	: I S L A M
Pekerjaan	: Karyawan Pegadaian

1. Posisi Kasus

Awal terjadinya kejadian adalah pada hari senin tanggal 05 Nopember 2012 sekitar pukul 02:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya di rumah AFRIANDY FAURIKKA al.ONCE di BTN Tamarunang Blok C No.12 Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makasar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak (korban) melakukan Persetubuhan yaitu saksi korban RIFA'AH MAHMUDA Yang masih berumur 15 (lima belas) tahun.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap delik kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Satria Gunaldhi, SE terhadap saksi Korban Rifa'ah Mahmuda yang di bacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa SATRI GUNALDHI I pada hari senin tanggal 05 november 2012 sekitar pukul 02:00 wita atau setidaknya tahun 2012 bertempat atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya di rumah AFRIANDIY FAURIKKA al.ONCE di BTN Tamarunang Blok C No.12 Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak (korban) melakukan Persetubuhan yaitu saksi korban RIFA'AH MAHMUDA Yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran : 1038/IST/A/CS/1998 tanggal 28 Pebruri 1998, an.RIFA'AH MAHMUDA lahir pada tanggal 31 Desember 1996) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mengenal saksi korban RIFA'AH MAHMUDA melalui Black Berry Massager (BBM) PADA AWAL BULAN Nopember 2012 yang mana saat itu korban RIFA'AH MAHMUDA berdomisili di kalibata jakarta selatan sedangkan terdakwa SATRIA GUNALDHY berada di Makassar. Selanjutnya saksi Korban RIFA'AH MAHMUDA dengan terdakwa SATRIA GUNALDHY menjalin hubungan asmara/pacaran. Kemudian saksi korban RIFA'AH MAHMUDA mengatakan kepada terdakwa SATRIA GUNALDHY "Kalau kamu memang serius, datang ke kalibata Jakarta. Lalu terdakwa janji ketemu dengan saksi korban RIFA'AH MAHMUDA di Hotel. Pada hari minggu malam 04 Nopember 2012 terdakwa SATRIA GUNALDHY mengajak saksi korban RIFA'AH MAHMUDA pergi ke makassar untuk di perkenalkan dengan keluarganya di Makassar, lalu terdakwa SATRIA GUNALDHY membelikan tiket pesawat.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekira pukul 02:00 wita terdakwa SATRIA GUNALDHY dan saksi korban RIFA'AH MAHMUDA di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pada saat itu di jemput oleh saudara terdakwa SATRIA GUNALDHY yang bernama saksi OLIVIADINATA al.OFIAN dan saksi ANDI RESKIWANDANI. Selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi AFRIANY FAURIKKA al. ONCE. Sesampainya di rumah terlibat pembicaraan yang kemudian saksi korban RIFA'AH MAHMUDA masuk kedalam salah satu kamar di ikuti dengan terdakwa SATRIA GUNALDHY yang di ketahui oleh saksi OLIVIADINATA al.OFIAN dan saksi ANDI RESKIWANDANI. Pada saat itu di dalam kamar terdakwa SATRIA GUNALDHY merayu

saksi korban RIFA'AH MAHMUDA akan bertanggung jawab apabila hamil dan menikahi saksi korban RIFA'AH MAHMUDA. Selanjutnya terdakwa SATRIA GUNALDHY melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan alat kelamin terdakwa SATRIA GUNALDHY kedalam kemaluan saksi korban RIFA'AH MAHMUDA maju mundur sehingga terdakwa SATRIA GUNALDHY mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di luar alat kelamin saksi korban RIFA'AH MAHMUDA.

- Akibat perbuatan SATRIA GUNALDHY, berdasarkan surat Visum Et Repertum RS.BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor: VER/26/XI/2012/RUMKIT tertanggal 14 Nopember 2012 yang di tandatangani oleh dr.SUZANNA S.PAKASI, Sp.OG atas permintaan Visum Et Repertum dari an. Kapolrestabes Makassar Kriminal yang di tandaangani oleh Kepala Kesatuan Reserse AKBP. HIMAWAN SGEHA, SIK Nrp.74020329, Nomor: B/1526/XI/2012/Reskrim tanggal 14 Nopember 2012.

Kesimpulan:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap korban dan di dapatkan luka Robekan lama pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan. Tak tampak kekerasan pada alat kelamin luar .

Perbuata terdakwa SATRIA GUNALDHY sebagaimana di atas di atur dan di ancam pidana pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Subsidaair :

Bahwa terdakwa SATRI GUNALDHI pada hari senin tanggal 05 november 2012 sekitar pukul 02:00 wita atau setidaknya tahun 2012 bertempat atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya di rumah AFRIANDIY FAURIKKA al.ONCE di BTN Tamarunang Blok C No.12 Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak (korban) melakukan Persetubuhan yaitu saksi korban RIFA'AH MAHMUDA Yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (berdasarkan akta kelahiran : 1038/IST/A/CS/1998 tanggal 28 Pebruri 1998, an.RIFA'AH MAHMUDA lahir pada tanggal 31 Desember 1996) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mengenal saksi korban RIFA'AH MAHMUDA melalui Black Berry Massager (BBM) PADA AWAL BULAN Nopember 2012 yang mana saat itu korban RIFA'AH MAHMUDA berdomisili di kalibata jakarta selatan sedakan terdawa SATRIA GUNALDHY berada di Makassar. Selanjutnya saksi Korban RIFA'AH MAHMUDA dengan terdakwa SATRIA GUNALDHY mnjalin hubungan asmara/pacaran. Kemudian saksi korban RIFA'AH MAHMUDA mengatakan kepada terdakwa SATRIA GUNALDHY

“Kalau kamu memang serius, datang ke kalibata Jakarta. Lalu terdakwa janjian ketemu dengan saksi korban RIFA’AH MAHMUDA di Hotel. Pada hari minggu malam 04 Nopember 2012 terdaka SATRIA GUNALDHY mengajak aksi korban RIFA’AH MAHMUDA pergi ke makassar untuk di perkenalkan dengan keluarganya di Makassar, lalu terdakwa SATRIA GUNALDHY membelikan tiket pesawat.

- Bahwa pada hari senin, tanggal 05 Nopember 2012 sekira pukul 02:00 wita terdakwa SATRIA GUNALDHY dan saksi korban RIFA’AH MAHMUDA di Bandara SultaN Hasanuddin Makassar. Pada saat itu di jemput oleh saudara terdakwa SATRIA GUNALDHY yang bernama saksi OLIVIADINATA al.OFIAN dan saksi ANDI RESKIAWANDANI. Selanjunya bersama-sama menuju rumah saksi AFRIANY FAURIKKA al. ONCE. Sesampainya di rumah terlibat pembicaraan yang yang kemudian saksi korban RIFA’AH MAHMUDA masuk kedalam salah satu kamar di ikuti dengan terdakwa SATRIA GUNALDHY yang di ketahui oleh saksi OLIVIADINATA al.OFIAN dan saksi ANDI RESKIWANDANI. Pada saat itu di dalam kamar terdakwa SATRIA GUNALDHY merayu saksi korban RIFA’AH MAHMUDA akan bertanggung jawab apabila hamil dan menikahi saksi korban RIFA’AH MAHMUDA. Selanjutnya terdakwa SATRIA GUNALDHY melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan alat kelamin terdakwa SATRIA GUNALDHY kedalam kemaluan saksi korban RIFA’AH MAHMUDA maju mundur sehingga terdakwa SATRIA GUNALDHY mengeluarkan sperma yang di umpahkan di luar alat kelamin saksi korban RIFA’AH MAHMUDA.
- Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri saksi korban RIFA’AH MAHMUDA baru mengetahui yang mana terdakwa SATRIA GUNALDHY sudah berkeluarga memiliki istri dan anak di soppeng.
- Akibat perbuatan SATRIA GUNALDHY, berdasarkan surat Visum Et Repertum RS.BHAYANGKARA MAKASSAR Nomor: VER/26/XI/2012/RUMKIT tertanggal 14 Nopember 2012 yang di tandatangani oleh dr.SUZANNA S.PAKASI, Sp.OG atas permintaan Visum Et Repertum dari an. Kapolrestabes Makassar Kriminal yang di tandaangani oleh Kepala Kesatuan Reserse AKBP. HIMAWAN SGEHA , SIK Nrp.74020329, Nomor: B/1526/XI/2012/Reskrim tanggal 14 Nopember 2012.

Kesimpulan:

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap korban dan di dapatkan luka Robekan lama pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan. Tak tampak kekerasan pada alat kelamin luar .

Perbuatan terdakwa SATRIA GUNALDHY sebagaimana di atas diatur dan di ancam pidana pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan penuntut umum Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang dilakukan oleh terdakwa SATRIA GUNALDHY terhadap saksi korban RIFA'AH MAHMUDA maka Penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA GUNALDHY, SE terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam subsidair pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA GUNALDHY,SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menerapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak Kekerasan Seksual Terhadap anak (persetubuhan) oleh terdakwa SATRIA GUNALDHY terhadap saksi korban RIFA'AH MAHMUDA adalah sebagai berikut;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya di ringankan dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM – 45/Mks/03/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang melanggar

pasal sebagaimana dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan, jaksa penuntut umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, yakni saksi AFRIANDY FAUURIKKA al.ONCE dan saksi OLFINDINATA al.OFIAN dan saksi ANDI RESKIAWANDANI dan saksi RIFA'AH MAHMUDA sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang , bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang selengkapnya termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang di dukung pula dengan barang bukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual **“Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”**;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah, maka terdakwa akan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagi berikut;

Hal- hal Yang Memberakan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih di bawah umur.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara.

5. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SATRIA GUNALDHY, SE tersebut diatas terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah Umur”.
2. Menjatuhkan piana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor.112/pid.B/2013/P.N.Mks Hakim pemutus perkara menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan di atas, banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan, diantaranya:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
3. Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan, karena korban seorang anak di bawah umur.

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa berlaku sopan pada persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Penulis beranggapan bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim di atas adalah hal yang sudah tepat. Namun dalam kaitannya dengan penerapan sanksi terhadap terdakwa penulis kurang sepakat.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Dalam ketentuan di atas, pidana penjara yang dapat di terapkan oleh Hakim adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Namun dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan putusan penjara kepada terdakwa selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain yang menjadi korban pada perkara ini adalah anak. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menambah kesengsaraan korban maupun keluarganya dan tentunya hal tersebut sangat tidak berperikemanusiaan.

Selain menjatuhkan sanksi pidana penjara, hakim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 60.000.000,-. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa hakim dapat menerapkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam perkara ini hakim hanya menerapkan sanksi denda yang paling sedikit. Sementara perbuatan terdakwa pada perkara ini dapat dikategorikan perbuatan pidana yang seharusnya dijatuhi sanksi maksimal, dikarenakan yang menjadi korban pada perkara ini adalah seorang anak.

Selain itu denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di jatuhkan oleh hakim dapat digantikan dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, apabila ternyata terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut.

Perbandingan sanksi yang diberikan oleh hakim sangatlah tidak relevan. Tentunya jika kita memperhitungkan putusan hakim mengenai sanksi pidana penjara sebagai pengganti sanksi denda sebagaimana diputuskan oleh hakim di atas terdakwa akan memilih menjalani sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibandingkan harus membayar uang denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Kekerasan Seksual (persetubuhan) Terhadap Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pemidanaan Merupakan Suatu Proses Hukum di mana sebelum proses hukum ini

berlanjut peranan Hakim sangat Penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.

Jadi pidana yang di jatuhkan di harapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa perdamaian dalam Bermasyarakat.

Pemidanaan tidak di maksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenankan untuk menjatuhkan nama baik dan atau/ martabat seseorang melainkan merupakan sebuah pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia.

Pada Hakekatnya, pidana itu merupakan suatu nestapa namun pemidanaan tidak di maksudkan unuk menderitakan dan tidak di perkenankan merendahkan martabat manusia.

Untuk memeperjelas penjatuhan sanksi pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual (persetubuhan) terhadap Anak maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 45 / Mks / 03 / 2013 tanggal 21 januari 2013 yang melanggar pasal, sebagaimana dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan 4 (Empat) Orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, yakni saksi saksi AFRIANDY FAUURIKKA al.ONCE dan saksi OLFANDINATA al.OFIAN dan saksi ANDI RESKIAWANDANI dan saksi RIFA'AH MAHMUDA sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang selengkapya termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang di dukung pula dengan barang bukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual "Persetubuhan Terhadap Anak di

Bawah Umur”. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA GUNALDHY, SE tersebut diatas terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak di bawah Umur”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dan di ucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SELASA tanggal 05 MARET 2013.

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian di atas, hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya hanya memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa, dalam arti lain hakim menggunakan teori relatif dalam menjatuhkan putusan pidananya.

Dimana tujuan dari teori tersebut adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang terungkap hakim seharusnya dapat memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat, merusak masa depan saksi korban yang masih anak-anak, dan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut :

(Andi Hamzah, 2005 : 31). Mengemukakan bahwa :

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang

dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen (Wirjono Projdodikoro, 2003 : 26) bahwa "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti denda yang lebih berat lagi. Agar korban mendapatkan santunan uang pengganti atas perlakuan yang telah di alaminya dari terdakwa. Hal ini semestinya harus dilakukan oleh hakim sebagai wujud upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan pada perkara putusan pengadilan nomor:112/PID.B/2013/PN.MKS.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (persetubuhan) telah memenuhi unsur-unsur pembedaan menurut hukum pidana.

Hal ini di dasarkan pada pemeriksaan di dalam persidangan dimana alat bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang salin berkesesuaian di tambah keterangan terdakwa.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terdakwa terbukti secara Sah melakukan

Tindak kekerasan seksual (persetubuhan) Terhadap Anak dengan mengakui secara jujur Perbuatannya.

Oleh karena itu Terdakwa dijatuhi Hukuman dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan Hukum dan tidak terdapat alasan pembenar.

Terdakwa juga merupakan orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf.

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang berisikan pemindaan belum tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur delik dalam perkara putusan Nomor: 112/Pid.B/2013/P.N.Mks telah memenuhi unsur dengan melihat pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Penjatuan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur delik dalam perkara putusan Nomor: 112/Pid.B/2013/P.N.Mks telah memenuhi syarat-syarat pembedaan menurut hukum pidana.

Hal ini di dasarkan pada pemeriksaan di persidangan karena alat Bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi dan korban yang saling berkesesuaian,ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa sesuai rumusan delik yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Namun Penjatuan pidana yang di jatuhkan kepada tersangka belum sesuai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana agar memperhatikan ketentuan yang di berlakukan kepada terdakwa dan sesuai dengan aturan dalam Undang-undang yang berlaku.
2. Perlunya di terapkan Norma-norma, kaidah, Agama, serta Etika dalam pergaulan agar senantiasa menanamkan nilai moral dalam kehidupan, serta tidak melanggar Norma Agama, Nilai-nilai kehidupan dan moral berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* 2005. Elsam, Jakarta.
- Achmad, Fauzan. *Undang-undang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*.
- Anonim, 2005. Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) <http://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php?option=cotent&task=view&id=16>, diakses tanggal 17 Juni 2010.
- Anonim, 2002. *Standarisasi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga*, Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga. Departemen Sosial RI.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Rusly. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN – UMI. Ujung Pandang.
- Ginting, Lindawati, 2000, *Perlindungan Anak Dalam Bidang Hukum Perdata*, Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum, BPHN, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 02 Nopember 1999, *Anak dan Kekerasan*, Kasus Indonesia, Majalah Hakiki.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak), <http://www.elsam.or.id>.
- Lamintang, P.A.F. 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico, Bandung.
- _____. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Manik, Sulaiman Zuhdi, 22 Mei 2008, Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, <http://www.kabarindonesia.com>.

Purnianti & Serena, Rita kolibonso. 2003, seorang anak secara hukum sepenuhnya dapat menjadi subyek sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan mengatas-namakan “disiplin rumah tangga”. (hal : 31).

Parsudi, Suparlan, 1989. Kemiskinan di Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Setyowati, Irma, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.

Soesilo, R. 1977. Pokok-pokok hukum Pidana, Peraturan Umum, Dan Khusus. Politea. Bogor.

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Suyanto, Bagong, 2003, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, Airlangga University Press, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <http://www.legalitas.org>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.legalitas.org>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, <http://www.legalitas.org>.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 29 Januari 2015

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 48 /HKM/I/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

RAMLI DJALIL, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ANDI TENRI WALINONONG**
No.Pokok : B111 11 263
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : BTN Wesabbe Blok C No. 55 Makassar
Judul Skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL (PERSETUBUHAN) TERHADAP ANAK (STUDY KASUS PUTUSAN NO. 112/PD.B/2013/PN.MKS)”**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 07 Januari 2015 dengan Nomor : 88/UN4.6.3/PL.02/2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS,



RAMLI DJALIL, SH.MH
NIP.1962123119910310045